

# UNSUR MODALITAS DALAM WACANA KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI ERA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

Oleh:

**Aditya Tri Prasetyo<sup>1</sup>**

**Bima Kurniawan<sup>2</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [adityatriprasetyo5@gmail.com](mailto:adityatriprasetyo5@gmail.com)

***Abstract.** This study analyzes the use of modality in the discourse on the policy of increasing the Value Added Tax (VAT) rate from 11 percent to 12 percent under the administration of President Prabowo Subianto. Using a qualitative descriptive approach, data sources were obtained from credible editorials and news reports, including those from \*Tempo\* and \*CNN\*. The modality analysis covers five main aspects: probability, usuality, inclination, obligation, and their combinations. Probability reflects the uncertainty of the policy's impact, usuality highlights recurring patterns in public responses, inclination emphasizes the government's intent, and obligation underscores the administrative requirements for policy implementation. The combination of modality elements reveals the complexity of the relationship between uncertainty and expectations in policy narratives. The findings show that modality not only serves as a communication tool but also plays a strategic role in shaping policy narratives that influence public perception. Modality functions as a communication bridge, conveying government policies to the public, fostering better understanding, and supporting policy implementation. This study highlights the importance of linguistic analysis in understanding communication strategies within public policy.*

**Keywords:** Modality, Value-Added Tax, Public Perception.

# UNSUR MODALITAS DALAM WACANA KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI ERA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis penggunaan modalitas dalam wacana kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh dari editorial dan laporan berita media yang kredibel mencakup Tempo dan CNN. Kajian modalitas terdiri lima aspek utama di antaranya probabilitas, usualitas, inklinasi, obligasi, dan kombinasi antarunsurnya. Probabilitas menggambarkan ketidakpastian dampak kebijakan, usualitas mencerminkan pola berulang dalam respons masyarakat, inklinasi menyoroti keinginan pemerintah, dan obligasi menekankan kewajiban administratif terkait implementasi kebijakan. Kombinasi antar unsur modalitas mengungkapkan adanya kompleksitas hubungan antara ketidakpastian dan harapan dalam narasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modalitas tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membentuk narasi kebijakan yang memengaruhi persepsi publik. Modalitas berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mendukung implementasi kebijakan. Penelitian ini menyoroti pentingnya analisis linguistik untuk memahami strategi komunikasi dalam kebijakan publik.

**Kata Kunci:** Modalitas, Pajak Pertambahan Nilai, Persepsi Publik.

## LATAR BELAKANG

Modalitas merupakan elemen penting dalam linguistik yang mencerminkan sikap pembicara terhadap suatu peristiwa atau pernyataan. Menurut Roca-Royes (2023) modalitas adalah fenomena yang luas dan mencakup berbagai jenis, yang mencerminkan beragam aspek realitas atau kemungkinan. Dalam filsafat, terutama metafisika, modalitas merujuk pada jenis fenomena tertentu yang berhubungan dengan sumber dan sifat kemungkinan atau keharusan metafisik. Modalitas ini penting untuk memahami dan menyatukan berbagai bentuk kemungkinan dalam konteks filosofis.

Modalitas telah menjadi fokus perhatian para ahli bahasa dan teoretikus untuk mendorong beragam pendekatan untuk menggali esensinya dalam berbagai bentuk dan fungsi bahasa. Beberapa ahli mencoba mengelompokkan kata kerja modal tambahan ke dalam satu kategori tunggal. Namun, dengan perkembangan pesat dalam kajian bahasa modern, pendekatan konvensional semakin sulit diterapkan. Fitur linguistik dalam teks

atau wacana baik berupa lisan, tulisan, visual, maupun kombinasi dari ketiganya kini memerlukan kerangka analisis yang lebih fleksibel dan dinamis. Oleh karena itu, para teoretikus terus mengembangkan dasar yang kuat untuk memahami dan mengategorikan fitur-fitur linguistik dalam konteks yang lebih relevan dan mutakhir. Modalitas sebagai sifat linguistik merujuk pada penggunaan kata kerja modal serta elemen linguistik lainnya untuk menyampaikan makna terkait kemungkinan, keharusan, atau izin dalam pelaksanaan fungsi bahasa (Ajmal et.al, 2020).

Menurut Andersen (2017) mood adalah elemen utama dalam sistem klausa interpersonal yang berperan penting dalam interaksi dialogis. Sistem ini memberikan alat bagi para pelaku komunikasi untuk menyampaikan atau meminta suatu komoditas, baik berupa informasi, barang dan jasa, maupun sumber daya lain yang mendukung fungsi tuturan. Fungsi-fungsi ini diwujudkan melalui struktur tata bahasa klausa, termasuk dalam bentuk pernyataan untuk menyampaikan informasi atau pertanyaan untuk meminta informasi. Selain itu, modalitas memegang peranan penting dalam membangun fungsi metafungsional interpersonal pada klausa, karena modalitas membantu menegaskan validitas atau kepastian dari sebuah proposisi.

Dalam bahasa, modalitas dapat diwujudkan dalam bentuk probabilitas, usualitas, inklinasi, dan obligasi, yang secara kolektif mencerminkan tingkat kepastian, kebiasaan, keinginan, atau kewajiban yang terkait dengan suatu tindakan atau keputusan. Studi tentang modalitas tidak hanya berfokus pada aspek kebahasaan, tetapi juga pada bagaimana modalitas tersebut membangun pemahaman dan persepsi audiens terhadap sebuah wacana, termasuk wacana kebijakan publik.

Menurut Silachai dan Poonpon (2016), wacana editorial berita memiliki peran penting dalam membentuk opini publik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam wacana ini, unit-unit bahasa dan hubungan antara sifat serta fungsinya terstruktur secara sistemik dan implisit mencerminkan cara editorial menyampaikan pesan mereka. Untuk mencapai efektivitas, editorial berita membutuhkan pemahaman bersama antara editor dan pembaca agar berbagai elemen dalam wacana dapat saling berhubungan.

Dalam editorial, fungsi metafungsional interpersonal memainkan peran utama dengan menjadikan klausa sebagai sarana untuk bertukar informasi sekaligus mencerminkan hubungan sosial antara penulis dan pembaca. Fungsi ini diwujudkan melalui interaksi semantik yang kaya, penggunaan metalanguage sebagai alat untuk

# UNSUR MODALITAS DALAM WACANA KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI ERA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

memperjelas pertukaran makna, serta penerapan modalitas yang mempertegas pesan yang ingin disampaikan. Sinergi dari elemen-elemen ini membuat wacana editorial memiliki daya pengaruh yang kuat dalam membentuk pandangan dan persepsi pembaca.

Dalam konteks pemerintahan, modalitas berperan sebagai alat komunikasi yang strategis untuk mengelola opini publik, mengarahkan interpretasi kebijakan, dan memperkuat legitimasi. Ketika pemerintah menghadapi isu sensitif seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), modalitas menjadi kunci dalam menyampaikan keputusan, memastikan transparansi, dan meredam resistensi masyarakat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, misalnya, menggunakan berbagai bentuk modalitas dalam menyampaikan kebijakan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. Kebijakan ini dirancang untuk berlaku secara selektif hanya pada barang-barang mewah, namun pelaksanaannya melibatkan berbagai tingkat ketidakpastian, komitmen, dan kewajiban yang diatur melalui komunikasi publik.

Transmisi kebijakan ini menyoroti kompleksitas wacana kenaikan PPN, mulai dari peran aktor-aktor utama seperti Presiden, Menteri Keuangan, hingga parlemen, hingga tantangan implementasi dan penerimaan publik. Berbagai modalitas dalam teks berita mencerminkan bagaimana kebijakan ini disampaikan kepada audiens, baik dalam bentuk pernyataan kemungkinan, penekanan kewajiban, pengakuan kebiasaan, maupun pernyataan keinginan atau harapan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis modalitas dalam teks berita terkait kenaikan PPN, dengan fokus pada bagaimana modalitas ini digunakan untuk membangun narasi kebijakan dan memengaruhi persepsi publik. Melalui pendekatan ini, artikel ini berharap memberikan wawasan tentang bagaimana komunikasi kebijakan dapat dikelola secara strategis melalui penggunaan modalitas, serta dampaknya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **Sumber Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber berita yang secara khusus membahas kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Fokus utama pengambilan data adalah editorial dan laporan kebijakan yang merepresentasikan pandangan pemerintah, parlemen, serta pihak terkait lainnya. Kutipan teks yang dipilih diambil secara selektif untuk dianalisis dari sudut pandang

linguistik. Untuk menjaga keseimbangan dan kredibilitas analisis, penelitian ini menggunakan narasi dari sumber editorial yang saling melengkapi meliputi media terkemuka seperti Tempo dan *Cable News Network* (CNN).

Perspektif yang disajikan oleh kedua media ini memberikan pandangan yang beragam dan kaya terhadap wacana kenaikan PPN yang memungkinkan analisis lebih komprehensif. Pentingnya variasi sumber data ini terletak pada kemampuan untuk menelusuri dan membandingkan narasi kebijakan, terutama dalam konteks rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang sedang berlangsung. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menggali sudut pandang yang mendalam mengenai strategi komunikasi kebijakan publik dan implikasinya terhadap opini masyarakat.

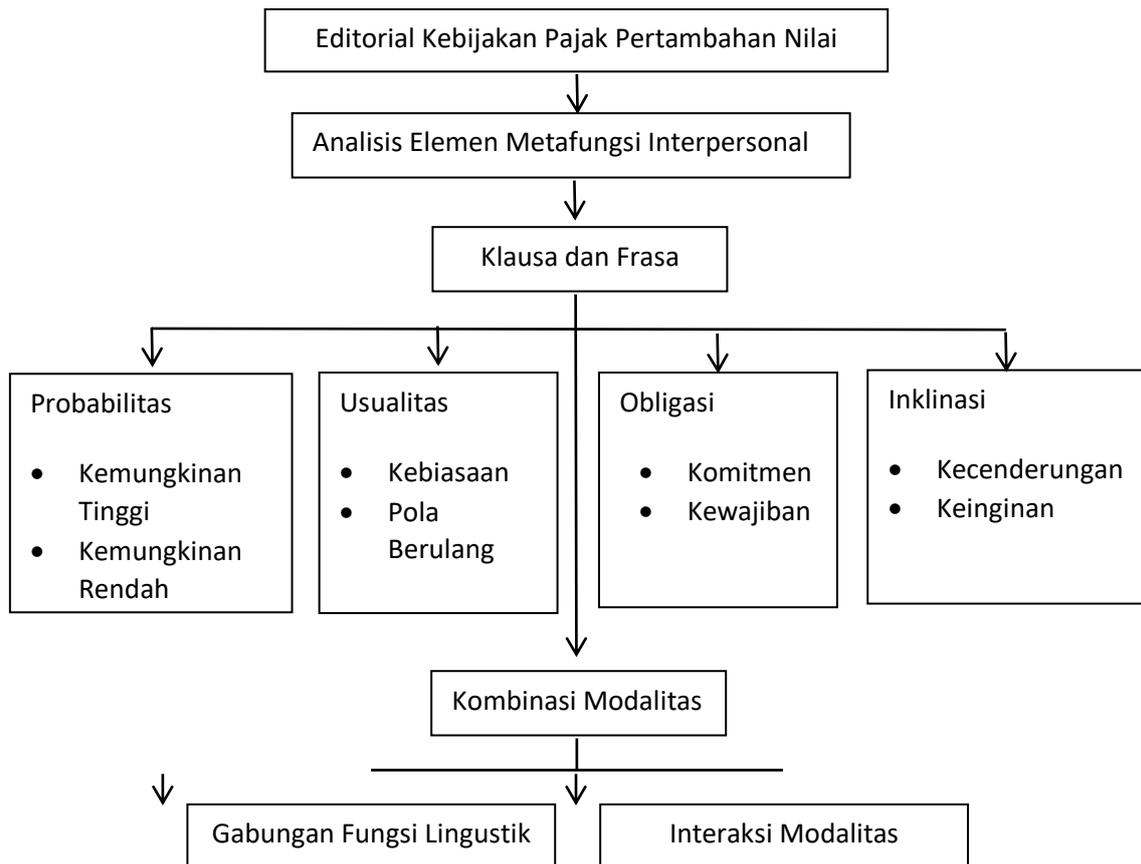
### **Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi dan menginterpretasikan elemen-elemen modalitas yang terkandung dalam teks berita terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Data berupa teks editorial atau berita dianalisis untuk mengeksplorasi penggunaan berbagai jenis modalitas, seperti probabilitas, usualitas, inklinasi, dan obligasi.

Setiap kutipan dianalisis untuk mengidentifikasi modalitas yang terkandung di dalamnya untuk kemudian ditafsirkan berdasarkan konteks wacana, termasuk pesan yang ingin disampaikan, sikap pembicara, dan pengaruhnya terhadap pembentukan opini publik. Elemen-elemen linguistik dianalisis untuk memahami bagaimana modalitas digunakan untuk mendukung narasi kebijakan dan memengaruhi audiens. Dengan dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi dan menggambarkan perspektif tertentu tentang keadaan, linguistik fungsional sistemik menjelaskan bagaimana tujuan ini dapat tercapai melalui fokus pengamatan pada meta fungsi tekstual (McCabe dan Heilman (2007).

# UNSUR MODALITAS DALAM WACANA KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI ERA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

## Kerangka Penelitian



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur modalitas dalam wacana kenaikan pajak pertambahan nilai 11 persen menjadi 12 yang disepakati oleh pemerintahan presiden Prabowo Subianto berdasarkan sumber kabar berita yang bereputasi dapat diuraikan beberapa komponen sebagai berikut.

### Probabilitas

Sebuah peristiwa yang menggambarkan kemungkinan terkait kejadian di masa depan tercermin dalam pernyataan, "Pemerintah akan menunda kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi PPN 12 persen yang sedianya mulai berlaku pada Januari 2025." Frasa "akan menunda" menunjukkan rencana penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai yang masih dalam tahap pertimbangan. Makna modalitas dalam pernyataan ini menyiratkan probabilitas yang lemah, mengingat keputusan terkait penundaan tersebut belum final dan masih dikaji oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara

kata “akan” dan “kemungkinan” mengindikasikan adanya ketidakpastian terhadap keputusan akhir mengenai kebijakan ini.

### **Usualitas**

Usualitas menggambarkan frekuensi atau kecenderungan berulang suatu peristiwa, khususnya dalam wacana kebijakan pajak, usualitas muncul melalui pemilihan kata yang mencerminkan pola atau kemungkinan yang berulang. Salah satu contohnya adalah pernyataan ”Pemberlakuan PPN selektif yang rumit dapat memicu resistensi publik”. Kata “dapat” di sini menunjukkan adanya potensi resistensi publik, tetapi tidak bersifat mutlak. Pilihan kata ini mencerminkan usualitas dalam bentuk kemungkinan berulang yang mengisyaratkan bahwa resistensi dapat terjadi setiap kali kebijakan yang rumit diterapkan meskipun tidak selalu pasti.

Contoh lainnya adalah pernyataan ”Dua tarif yang berbeda akan mendorong orang untuk melakukan manipulasi pajak”. Kata “akan” mengindikasikan sebuah prediksi bahwa manipulasi pajak tidak hanya mungkin terjadi, tetapi juga cenderung menjadi pola berulang akibat kebijakan tarif ganda. Dalam hal ini, usualitas menggarisbawahi ekspektasi terhadap perilaku yang dapat terjadi secara berulang dalam sistem perpajakan yang kompleks. Dari kedua pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa usualitas membantu menjelaskan bagaimana pola atau kecenderungan dalam perilaku publik dapat muncul sebagai respons terhadap kebijakan tertentu. Pilihan kata seperti “dapat” dan “akan” tidak hanya menggambarkan kemungkinan, tetapi juga menyoroti bagaimana suatu peristiwa memiliki kecenderungan untuk terjadi secara berulang dalam konteks yang relevan.

### **Inklinasi**

Inklinasi dalam modalitas mencerminkan keinginan atau harapan pihak tertentu terhadap suatu tindakan atau keputusan. Hal ini tertulis dalam pernyataan ”Presiden menyampaikan teknisnya nanti Menteri Keuangan yang akan mengatur”. Kata “nanti” dan “akan mengatur” menunjukkan adanya ekspektasi dari Presiden bahwa Menteri Keuangan akan menjalankan langkah-langkah teknis yang diperlukan. Frasa ini menekankan harapan Presiden agar tugas tersebut dilaksanakan sesuai arahan yang telah ditetapkan. Sementara itu, pernyataan ”Pemerintah telah mengambil langkah untuk tidak memungut pajak tertentu sejak akhir 2023”.

# UNSUR MODALITAS DALAM WACANA KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI ERA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

Frasa “telah mengambil langkah” mencerminkan keputusan yang didasarkan pada keinginan pemerintah untuk melindungi masyarakat kecil. Pilihan kata ini tidak hanya menunjukkan niat, tetapi juga mengindikasikan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan sebagai wujud harapan pemerintah terhadap perlindungan kelompok rentan. Pola bahasa tersebut menggarisbawahi bagaimana inklinasi memainkan peran penting dalam menggambarkan harapan atau niat yang mendasari kebijakan pemerintah. Pilihan kata seperti “nanti”, “akan mengatur”, dan “telah mengambil langkah” mencerminkan dorongan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam konteks kebijakan dan tindakan.

## **Obligasi**

Obligasi dalam modalitas merefleksikan kewajiban yang melekat pada suatu tindakan atau keputusan. Hal ini tercermin dalam pernyataan ”Presiden menugaskan Menteri Keuangan untuk merumuskan daftar pengecualian lebih lanjut”. Kata kerja “menugaskan” mencerminkan kewajiban yang diberikan Presiden kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan tugas tertentu. Pilihan kata ini menekankan modalitas obligasi tinggi, di mana tindakan Menteri Keuangan menjadi keharusan dalam konteks pelaksanaan arahan kebijakan yang lebih rinci. Obligasi modalitas dapat ditemukan dalam pernyataan ”Pemerintah hanya mengikuti keputusan Komisi XI DPR soal kenaikan PPN”. Terdapat kombinasi frasa verbal “hanya mengikuti” yang mengindikasikan kewajiban administratif pemerintah untuk mematuhi keputusan DPR.

Meskipun kebijakan perpajakan tetap berada di ranah eksekutif, pemerintah terikat pada mekanisme formal yang mengharuskan mereka menghormati keputusan DPR dalam pengambilan keputusan kolektif. Makna obligasi modalitas ini memainkan peran penting dalam menegaskan keharusan atau kewajiban yang muncul dalam proses kebijakan. Pilihan kata seperti “menugaskan” dan “hanya mengikuti” menggambarkan bagaimana tanggung jawab tertentu dilekatkan pada individu atau institusi untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai aturan yang berlaku.

## **Kombinasi Modalitas**

Beberapa kalimat dalam berita menggabungkan berbagai jenis modalitas untuk menyampaikan makna yang lebih kompleks. Kombinasi ini sering kali mencakup probabilitas, obligasi, atau inklinasi yang digunakan untuk menunjukkan hubungan satu

sama lain secara bersamaan. Wacana kebijakan pajak yang mengkombinasikan berbagai elemen modalitas adalah pernyataan "Tinggal pemerintah, apakah kemudian men-consider, kondisi daya beli yang menurun". Dalam pernyataan ini, modalitas probabilitas terlihat pada penggunaan frasa "apakah kemudian" yang mencerminkan ketidakpastian tentang langkah pemerintah. Sementara itu, modalitas inklinasi tercermin dalam frasa "men-consider" yang menunjukkan keinginan atau niat pemerintah untuk mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Kombinasi modalitas dalam kalimat ini tidak hanya menggambarkan ketidakpastian keputusan, tetapi juga menyoroti harapan akan tindakan tertentu dari pihak pemerintah. Dengan demikian, modalitas membantu menyampaikan kompleksitas kebijakan yang melibatkan analisis terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dari contoh ini, kombinasi modalitas digunakan untuk mengintegrasikan berbagai aspek makna dalam sebuah pernyataan, memungkinkan penulis atau pembicara menyampaikan informasi dengan lebih mendalam dan bernuansa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Modalitas memainkan peran krusial dalam wacana kebijakan, termasuk dalam narasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam analisis ini, ditemukan bahwa elemen modalitas yang mendominasi adalah probabilitas, usualitas, inklinasi, obligasi, dan kombinasi modalitas, yang semuanya memiliki peran strategis dalam membangun narasi kebijakan. Unsur probabilitas muncul sebagai salah satu elemen yang paling sering digunakan, mencerminkan tingkat ketidakpastian dalam keputusan pemerintah. Penggunaan kata seperti "akan" dan "kemungkinan" menunjukkan bahwa pemerintah belum mencapai keputusan final, tetapi sedang mempertimbangkan berbagai aspek. Usualitas ditemukan dalam beberapa pernyataan yang menggambarkan pola atau kecenderungan berulang, seperti potensi resistensi publik atau manipulasi pajak yang mungkin terjadi secara berulang akibat kebijakan yang diterapkan. Inklinasi muncul dalam pernyataan yang menyoroti keinginan atau harapan pemerintah untuk mengambil langkah tertentu, misalnya melalui arahan Presiden kepada Menteri Keuangan untuk menyusun kebijakan teknis yang sesuai. Obligasi digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang melekat pada

# UNSUR MODALITAS DALAM WACANA KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI ERA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

institusi atau individu tertentu, seperti tugas Menteri Keuangan yang ditugaskan Presiden, atau kewajiban pemerintah untuk mematuhi keputusan Komisi XI DPR.

Sementara kombinasi modalitas terlihat dalam pernyataan yang mengintegrasikan berbagai elemen, mencakup probabilitas dan inklinasi yang menunjukkan hubungan kompleks antara ketidakpastian keputusan dan harapan terhadap tindakan tertentu. Secara keseluruhan, kombinasi elemen-elemen modalitas ini menciptakan wacana yang berlapis dan bernuansa, di mana keputusan pemerintah tidak hanya dipahami sebagai tindakan administratif, tetapi juga sebagai komunikasi strategis. Modalitas membantu menyampaikan pesan yang seimbang terkait kepastian kepada publik sekaligus mempertimbangkan dinamika sosial yang ada. Analisis ini menunjukkan bahwa modalitas tidak hanya menjadi aspek teknis linguistik, tetapi juga alat komunikasi yang strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan pemahaman masyarakat. Dengan memahami penggunaan modalitas, para pengambil kebijakan dapat lebih efektif dalam membangun narasi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan mereka.

## DAFTAR REFERENSI

- Ajmal, M., Alrasheedi, S., & Hussain, Z. (2020). The semantics of the modal verbs: A corpus-based analysis of manipulation and ideology in literary text(s). *Asian EFL Journal*, 27(4), 130-151.
- Andersen, T. H. (2017). Interpersonal meaning and the clause. In *The Routledge handbook of systemic functional linguistics* (pp. 139-154). Routledge.
- Anonymous. (2024, December 6). Prabowo soal PPN Naik 12 persen di 2025: Hanya Untuk Barang Mewah. Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241206164412-532-1174591/prabowo-soal-ppn-naik-12-persen-di-2025-hanya-untuk-barang-mewah/amp>
- McCabe, A., & Heilman, K. (2007). Textual and interpersonal differences between a news report and an editorial. *Revista alicantina de estudios ingleses*, 20, 139-156.
- Rachman, M. F., & Arjanto, D. (2024, December 8). Prabowo tetapkan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah, Sri Mulyani masih siapkan daftar. Retrieved from

<https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-tetapkan-ppn-12-persen-hanya-untuk-barang-mewah-sri-mulyani-masih-siapkan-daftar-1178782>

Roca-Royes, S. (2023). *Modality*. Cambridge University Press.

Silachai, N., & Poonpon, K. (2016). Analysis of linguistic features and functions in news editorial discourse related to human trafficking in the ASEAN community. In *Asian Conference on the Social Sciences Official Conference Proceedings*.